

**DINAMIKA PERKEMBANGAN ETNIS DI INDONESIA DALAM KONTEKS
PERSATUAN NEGARA**

Agus Joko Pitoyo dan Hari Triwahyudi

Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Korespondensi: Agus Joko Pitoyo (*e-mail*: aguspit@ugm.ac.id)

Abstrak

Banyak pandangan yang menyebutkan bahwa etnisitas merupakan penghambat untuk kesatuan dan persatuan. Hal penting yang menjadi tantangan ke depan adalah mendudukan variasi etnik sebagai bentuk kemajemukan bangsa yang mendukung persatuan negara. Dengan menggunakan data Sensus Penduduk di Indonesia, yakni Sensus Penduduk 1930, Sensus Penduduk 2000 dan Sensus Penduduk 2010, tulisan ini mencoba mengungkapkan dinamika etnis di Indonesia dalam perspektif historis. Penelitian ini mendiskusikan dinamika perkembangan etnik di Indonesia serta melihat bahwa keanekaragaman etnik tersebut dapat menjadi tantangan dan pemacu dalam persatuan negara. Melalui masyarakat multikultural yang saling menghargai perbedaan kebudayaan, akan dapat tercipta masyarakat yang memiliki pandangan, jiwa, dan tujuan yang sama. Selain itu, perwujudan dari perkembangan etnik di Indonesia juga harus disertai dengan adanya dukungan kebijakan pemerintah yang tidak hanya memihak pada golongan mayoritas saja karena asas yang dikedepankan adalah persamaan dan menghargai hak atas perbedaan kebudayaan.

Kata kunci: etnisitas, persatuan, kebangsaan, keanekaragaman

**DYNAMICS OF ETHNIC DEVELOPMENT IN INDONESIA IN THE CONTEXT OF
NATIONAL UNITY**

Abstract

Many views suggest that ethnicity is an obstacle to the unity. It is important to understand the variety and complexcity of ethnic in Indonesia in the context of unity. Using data Indonesian Cencus in 1930, 2000 and 2010 this study attempts to reveal ethnic dynamics in Indonesia in a historical perspective. This study discusses the dynamics of ethnic development in Indonesia as well as sees that ethnic diversity can be a challenge and a driver in the unity of the State. Through a multicultural society that respects cultural differences, it will create a society with the same vision, soul and purpose. In addition, the embodiment of ethnic development in Indonesia also must be accompanied by the support of government policies that not only favor certain majority group because the principle of equality is equality and respect for the right to cultural differences.

Keywords: *ethnicity, unity, nation, diversity*

Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan komposisi sukuyang sangat beragam. Hasil dari kerjasama BPS dan ISEAS (Institute of South Asian Studies) merumuskan bahwa terdapat sekitar 633 suku yang diperoleh dari pengelompokan suku dan subsuku yang ada di Indonesia. Ribuan pulau yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu ciri bahwa negera ini merupakan negara dengan keragaman suku dan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Telah diakui di tingkat internasional bahwa masyarakat Indonesia, baik secara vertikal maupun horizontal, merupakan masyarakat paling majemuk di dunia selain Amerika Serikat dan India (Sudiadi, 2009).

Sejak kemerdekaan Indonesia, data tentang etnisitas sangat terbatas, bahkan sensus penduduk yang oleh Pemerintah Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa pemerintahan Orde Baru belum menyentuh etnisitas (BPS, 2011). Hal itu terkait dengan kebijakan politik Pemerintah Indonesia yang berpandangan bahwa perbedaan suku yang dibesar-besarkan merupakan sebuah persoalan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Pemerintah pun berhati-hati dalam hal ini. Melalui sensus penduduk yang dilaksanakan BPS, pemerintah menghapus pertanyaan mengenai etnisitas dengan alasan pertanyaan tersebut akan mendorong sikap sukuisme dan membahayakan persatuan bangsa.

Survei etnisitas yang pertama kali dilakukan adalah tahun 1930 oleh Pemerintah Hindia Belanda. Banyak diantara para peneliti menggunakan data sensus tersebut sebagai acuan komposisi sukudi Indonesia. Pemerintah berhati-hati dalam menonjolkan perbedaan etnis. Pemerintah masih beranggapan bahwa etnisitas merupakan hambatan untuk

tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa sehingga pemerintah membentuk opini secara sistematis bahwa etnisitas merupakan konotasi negatif terhadap persatuan dan kesatuan (Tirtosudarmo, 2002). Hal senada juga diungkapkan oleh Soejatmiko (1983) seperti dikutip Abdullah dalam Jurnal *Etnovisi* Volume II Nomor 1 Tahun 2006 bahwa pemerintah Orde Baru menganggap etnisitas dan kesukuan merupakan penghambat pembangunan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan adalah syarat utama untuk mengatasi perselisihan antarsuku (Abdullah, 2006). Atas beberapa diskursus tersebut, tulisan ini hendak secara terperinci memetakan dan menjelaskan dinamika suku di Indonesia dalam perspektif historis.

Persebaran Suku di Indonesia

Salah satu permasalahan kependudukan di Indonesia adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Dalam upaya pemerataan penduduk dan pemerataan pembangunan, pemerintah melanjutkan program yang pernah dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk memenuhi kebutuhan tenaga perkebunan di pulau-pulau Indonesia yang masih jarang penduduknya. Program kolonisasi yang pernah dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda dilanjutkan oleh Pemerintah Indonesia dengan program Transmigrasi. Program ini telah dilaksanakan utamanya pada era pemerintahan Orde Baru dengan intensif (Tirtosudarmo, 2007).

Kebijakan pemerintah dalam upaya pemerataan penduduk dari pulau yang padat penduduk menuju pulau yang berpenduduk jarang ini berimplikasi pada komposisi penduduk yang menjadi lebih heterogen di pulau tujuan. Pengiriman transmigran oleh pemerintah yang menyebabkan komposisi penduduk daerah penerima menjadi lebih

heterogen akan menciptakan proses akulturasi budayasehingga terjadi variasi suku dan struktur masyarakat. Oleh karena itu, heterogenitas suku cenderung akan lebih banyak dijumpai di daerah-daerah yang memiliki sejarah program transmigrasi.

Selama ini Pulau Jawa adalah pulau dengan jumlah penduduk terbesar dan paling maju. Pulau Jawa merupakan pusat pembangunan dengan Jakarta sebagai ibukota negara yang juga terletak di Pulau Jawa. Selain ibukota negara, Pulau Jawa juga menjadi pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Mobilitas penduduk luar Jawa menuju Pulau Jawa pun tinggi. Sebagai catatan, tahun 1990, persentase penduduk Pulau Sumatera yang bermigrasi ke Jawa adalah 90 persen dari total penduduk Pulau Sumatera yang melakukan migrasi. Angka ini meningkat menjadi 91,3 persen tahun 2000. Bukti yang lainnya adalah migran dari Pulau Kalimantan tahun 1990 sebesar 80 persen menuju Pulau

Jawa dan tahun 2000 persentasenya tetap tinggi, yakni 79,5 persen. Begitu pun halnya dengan pulau-pulau lainnya, seperti Sulawesi, Maluku, dan Papua, persentase migran yang menuju Jawa juga relatif tinggi (BPS, 2015). Mencermati kecenderungan arus migrasi dari luar Pulau Jawa menuju Pulau Jawa yang terus tinggi, maka heterogenitas penduduk di seluruh wilayah Indonesia cenderung akan semakin heterogen. Hal ini bersifat timbal balik dan saling dukung, dalam arti tidak hanya pulau di luar Jawa sebagai tujuan transmigrasi, tetapi juga Pulau Jawa sebagai tujuan migrasi penduduk luar Jawa. Tentu saja multikulturalisme akan terus berlangsung dan semakin menguatkan perbedaan dalam persatuan Indonesia (Tabel 1).

Berdasarkan Tabel 1, tersaji 25 suku utama di Indonesia tahun 2000 dengan perincian 11 suku besar dengan persentase populasi lebih dari satu persen dan 14 suku lainnya dengan persentase 0,2-1 persen. Tiga suku terbesar

Tabel 1 Distribusi Suku di Indonesia menurut Urutan Peringkat Tahun 2000

Urutan Peringkat	Suku	Jumlah	Persen	Urutan Peringkat	Suku	Jumlah	Persen
1	Jawa	83.865.724	41,71	14	Cirebon	1.890.102	0,94
2	Sunda	30.978.404	15,41	15	Tionghoa Gorontalo/	1.738.936	0,86
3	Melayu	6.946.040	3,45	16	Huidanaio	974.175	0,48
4	Madura	6.771.727	3,37	17	Aceh	871.944	0,43
5	Batak	6.076.440	3,02	18	Toraja	750.828	0,37
6	Minangkabau	5.475.145	2,72	19	Nias/Kono/Niha	731.620	0,36
7	Betawi	5.041.688	2,51	20	Minahasa Buton, Butung,	659.209	0,33
8	Bugis	5.010.421	2,49	21	Butong	578.231	0,29
9	Banten	4.113.162	2,05	22	Atoni-Metto	568.445	0,28
10	Banjar	3.496.273	1,74	23	Manggarai	566.428	0,28
11	Bali	3.027.525	1,51	24	Bima	513.055	0,26
				25	Mandar	504.827	0,25

Sumber: Suryadinata, dkk., 2003

**Tabel 2 Persebaran Suku Dominan (Tiga Terbesar) di Pulau Sumatera
Tahun 2000-2010**

No	Kondisi Tahun 2000			Kondisi Tahun 2010		
	Provinsi/Suku	Jumlah	%	Provinsi/Suku	Jumlah	%
1.	Provinsi Aceh					
	- Aceh	871.944	50,32	- Aceh	3.819.955	85,382
	- Jawa	274.926	15,87	- Jawa	400.023	8,941
	- Lainnya	164.678	9,5	- Batak	147.295	3,292
2.	Provinsi Sumatera Utara					
	- Batak	4.827.264	41,95	- Batak	5.785.716	44,75
	- Jawa	3.753.947	32,62	- Jawa	4.319.719	33,41
	- Nias	731.620	6,36	- Nias	911.820	7,05
3.	Provinsi Sumatera Barat					
	- Minangkabau	3.747.343	88,35	- Minangkabau	4.219.729	87,33
	- Batak	187.656	4,42	- Batak	222.549	4,61
	- Jawa	176.023	4,15	- Jawa	217.096	4,49
4.	Provinsi Riau					
	- Melayu	1.792.558	37,74	- Melayu	1.828.815	33,20
	- Jawa	1.190.015	25,05	- Jawa	1.608.268	29,20
	- Minangkabau	534.854	11,26	- Batak	691.399	12,55
5.	Provinsi Jambi					
	- Melayu	910.832	37,37	- Jambi	1.337.521	43,57
	- Jawa	664.931	27,64	- Jawa	893.156	29,10
	- Kerinci	254.125	10,55	- Melayu	164.979	5,37
6.	Provinsi Sumatera Selatan					
	- Melayu	2.142.523	31,25	- SUMSEL	4.120.408	55,36
	- Lainnya	1.965.462	28,67	- Jawa	2.037.715	27,38
	- Jawa	1.851.589	27,01	- Melayu	602.741	8,10
7.	Provinsi Bengkulu					
	- Jawa	348.505	22,31	- Sumatera lainnya	942.027	55,07
	- Rejang	333.635	21,36	- Jawa	387.281	22,64
	- Serawai	279.154	17,87	- SUMSEL	144.197	8,43
8.	Provinsi Lampung					
	- Jawa	4.113.731	61,89	- Jawa	4.856.924	64,06
	- Lainnya	663.026	9,97	- Lampung	1.028.190	13,56
	- Sunda	583.453	8,78	- Sunda	728.684	9,61
9.	Provinsi Bangka Belitung					
	- Melayu Sumatera	Melayu	646.194	- Melayu Sumatera	841.771	69,03
	- Jawa	Tionghoa	103.736	- Jawa	101.655	8,34
	- Tionghoa	Jawa	52.314	- Tionghoa	99.624	8,17

Sumber: BPS, 2010

di Indonesia berturut-turut adalah suku Jawa 41,71 persen (83,9 juta penduduk), suku Sunda 15,41 persen (31 juta penduduk), dan suku Melayu 3,45 persen (7 juta penduduk). Fakta ini menunjukkan bahwa suku Jawa merupakan suku dominan di Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Perlu disampaikan bahwa penentuan suku tahun 2000 tersebut dilakukan menggunakan pendekatan *self identity*. BPS menggunakan prinsip *self identity*, yaitu prinsip penentuan suku kepada setiap penduduk dengan memberikan hak sepenuhnya pada tiap individu untuk menentukan sendiri suku yang sesuai. Penduduk diberikan hak menentukan sendiri suku yang tepat melekat pada dirinya. Sebagai contoh, apabila seseorang dilahirkan dari pasangan bapak bersuku Minang dan ibu bersuku Jawa, maka anak tersebut dapat memilih berdasarkan penilaiannya sebagai suku Minang atau Jawa.

Perkembangan Suku di Pulau Sumatera

Demi melihat dinamika persebaran suku di Indonesia, perlu dilakukan pembahasan berdasarkan pulau dengan provinsi sebagai unit analisis terkecil. Dimulai dari Pulau Sumatera, distribusi penduduk menurut suku di pulau ini sangat bervariasi. Beberapa provinsi di Pulau Sumatera memiliki persebaran suku yang cukup merata. Ini dapat dilihat pada komposisi jumlah penduduk yang ada di beberapa provinsi, seperti Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau. Di keempat provinsi tersebut tidak ada suku yang mendominasi populasi hingga mencapai 50 persen dari total jumlah penduduk. Sementara itu, beberapa suku yang cukup dominan adalah Melayu, Jawa, Minangkabau, Banjar, Bugis, Sunda, Nias, Batak, Kerinci, Tionghoa, Madura, Komerling, dan suku-suku kecil lainnya di Sumatera.

Berdasarkan Tabel 2, terdapat indikasi dominansi suku Jawa di Pulau Sumatera. Suku Jawa adalah suku yang cukup dominan di sembilan provinsi yang terdapat di Pulau Sumatera dan merupakan suku pendatang yang paling dominan. Hampir di semua provinsi, bahkan suku/etnik Jawa menempati peringkat kedua terbesar penduduk setelah suku adat (asli) menurut data tahun 2000-2010. Hal tersebut karena di Pulau Sumatera, kecuali Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Selatan, suku Jawa menduduki posisi ketiga terbesar setelah suku adat Minangkabau dan Batak. Terlihat bahwa selisih jumlah antara suku Jawa dengan suku Batak di Provinsi Sumatera Barat dan begitu pula antara suku Jawa dengan suku lainnya di Provinsi Sumatera Selatan relatif kecil.

Hal yang menarik terkait dengan perkembangan suku Jawa di Pulau Sumatera adalah yang terjadi di Provinsi Lampung. Persentase suku Jawa di Provinsi Lampung menduduki peringkat pertama dengan persentase sekitar 61 persen tahun 2000 dan meningkat menjadi 64 persen tahun 2010. Pada 2000, bahkan suku Lampung tidak muncul sebagai tiga suku terbesar di provinsi tersebut dan baru tahun 2010 muncul suku Lampung yang menempati peringkat kedua penduduk terbesar. Perkembangan suku Jawa di Lampung merupakan hasil dari program kolonisasi yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda tahun 1905. Lampung adalah daerah pertama yang dijadikan tujuan pemindahan penduduk dari Jawa Tengah. Oleh karena itu, suku Jawa sangat banyak di provinsi ini, bahkan sejak sebelum program transmigrasi diresmikan oleh pemerintah pada 1946.

Selain suku Jawa, di Provinsi Lampung juga terdapat suku Bali dan Sunda yang juga cukup dominan. Etnik Tionghoa merupakan salah satu suku yang meningkat jumlahnya secara cukup pesat. Berdasarkan hasil

Sensus Penduduk 2000, etnik suku Tionghoa tidak masuk dalam tiga belas besar suku di Provinsi Lampung. Pada Sensus Penduduk tahun 2010 etnik Tionghoa menempati peringkat 9 dengan 39.979 jiwa atau 0,53 persen.

Selain suku Jawa yang banyak tersebar di Pulau Sumatera, terdapat suku Melayu yang mendominasi di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Akar budaya di keempat provinsi tersebut adalah budaya Melayu. Provinsi hasil pemekaran dari Sumatera Selatan, yakni Jambi dan Bangka Belitung, pun memiliki akar budaya Melayu yang terus berkembang setelah pemekaran. Hal inilah yang menjadikan suku Melayu tetap cukup dominan di Pulau Sumatera. Beberapa suku lain yang juga dominan adalah suku Aceh, Minangkabau, dan Batak dengan dominansi suku Aceh di Provinsi NAD serta suku Minangkabau di Sumatera Barat jika didasarkan pada persebaran selama tahun 2000-2010. Kedua suku tersebut adalah suku asli dengan persentase lebih dari 85 persen. Sementara itu, suku Batak dominan di Sumatera Utara yang juga terbesar selama periode 2000-2010 dengan persentase sekitar 40 persen.

Perkembangan Suku di Pulau Jawa

Pulau Jawa, pulau yang disebut-sebut sebagai pusat pertumbuhan, nyatanya memiliki jumlah penduduk terbesar. Suku Jawa yang merupakan suku asli juga memiliki persebaran terbanyak di hampir semua provinsi, termasuk DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah suku Jawa, suku Sunda adalah suku kedua terbanyak di pulau yang paling padat ini. Suku Sunda dominan berada di Provinsi Jawa Barat yang merupakan suku adat di daerah tersebut. Namun, suku

ini juga ditemukan memiliki persebaran yang besar di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Banten. Suku ketiga terbanyak secara umum di Pulau Jawa adalah suku Betawi yang memiliki persebaran besar di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Sementara itu, muncul suku-suku lainnya yang hanya tersebar di beberapa provinsi tertentu, yaitu suku Banten di Provinsi Banten, suku Madura di Jawa Timur, dan etnik Tionghoa di Jawa Tengah.

Dominansi suku-suku asli dari Pulau Jawa bukan berarti Jawa tertutup terhadap suku di luar Jawa. Hal ini terbukti dengan perkembangan suku-suku dari luar Jawa yang cukup pesat, dalam arti banyak pendatang dari luar Jawa yang kemudian berkembang di Jawa. Beberapa suku luar Jawa dengan persentase cukup tinggi adalah suku Batak, Minangkabau, Melayu, Bugis, Banjar, dan Bali. Hal lain yang cukup menarik adalah perkembangan etnik Tionghoa sebagai etnik yang berasal dari luar negeri yang berkembang pula di Jawa. Etnik Tionghoa selalu berada pada sepuluh besar suku di seluruh provinsi di Pulau Jawa.

Apabila dilihat secara detail, terdapat dinamika perkembangan suku-suku di Pulau Jawa. Suku Jawa memiliki jumlah terbesar dan persebaran persebarannya pun tersebar menyeluruh di Indonesia. Perkembangan dari 2000 menuju 2010 terus kearah positif. Jika suku Jawa terus berkembang ke arah positif, pada sisi lain banyak suku lain yang justru berkurang dominasinya. Sebagai contoh adalah suku Sunda di Jawa Barat yang turun menjadi sekitar 71 persen pada 2010 dari sebelumnya 73 persen tahun 2000. Begitu pun halnya dengan suku Banten di Provinsi Banten yang turun menjadi sekitar 40 persen pada 2010 dari sebelumnya sekitar 46 persen tahun 2000. Fakta ini menunjukkan adanya pertambahan jumlah absolut, tetapi

jumlah relatifnya (persentasenya) berkurang. Terdapat indikasi perkembangan suku lain yang lebih besar dibandingkan dengan suku adat asli. Hal tersebut tidak lepas dari peran pembangunan daerah yang banyak menarik minat penduduk suku dari daerah lain untuk masuk dan menetap.

Berdasarkan Tabel 3, terlihat pula bahwa secara umum, suku Jawa di Jawa Tengah dan DIY yang merupakan suku adat asli di kedua provinsi ini mengalami penurunan persentase dari 2000 sampai 2010. Sementara itu, suku Jawa mengalami perkembangan persentase di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Pada periode 2000-2010 suku Jawa telah

berkembang pesat, utamanya di Provinsi Banten dari 12,3 persen menjadi 15,63 persen. Fakta ini menjadi bukti bahwa suku Jawa di Pulau Jawa pun berkembang ke provinsi-provinsi yang memiliki adat asli bukan Jawa.

Dominasi suku Jawa di Pulau Jawa tidak mutlak terjadi di seluruh provinsi di Jawa. Terdapat beberapa provinsi dengan tingkat kemajemukan yang cukup tinggi. Sebagai contoh, provinsi dengan heterogenitas suku tersebut tercermin dari data yang dimiliki DKI Jakarta. Beberapa suku yang berkembang di Jakarta, antara lain, adalah Jawa, Betawi, Sunda, Tionghoa, Batak, Minangkabau,

Tabel 3 Persebaran Suku Dominan (Tiga Terbesar) di Pulau Jawa Tahun 2000-2010

No	Kondisi Tahun 2000			Kondisi Tahun 2010		
	Provinsi / Suku	Jumlah	%	Provinsi/Suku	Jumlah	%
1.	DKI Jakarta					
	- Jawa	2.927.340	35,16	- Jawa	3.453.453	36,17
	- Betawi	2.301.587	27,65	- Betawi	2.700.722	28,29
	- Sunda	1.271.531	15,27	- Sunda	1.395.025	14,61
2.	Provinsi Jawa Barat					
	- Sunda	26297124	73,73	- Sunda	30.889.910	71,87
	- Jawa	3.939.465	11,04	- Jawa	5.710.652	13,29
	- Betawi	1.901.930	5,33	- Betawi	2.664.143	6,20
3.	Provinsi Jawa Tengah					
	- Jawa	30.287.197	97,96	- Jawa	31.560.859	97,73
	- Sunda	323.207	1,05	- Sunda	451.271	1,40
	- Tionghoa	165.531	0,54	- Tionghoa	139.878	0,43
4.	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta					
	- Jawa	3.020.157	96,82	- Jawa	3.331.355	96,53
	- Lainnya	36.769	1,18	- Sunda	23.752	0,69
	- Sunda	17.593	0,56	- Melayu	15.430	0,45
5.	Provinsi Jawa Timur					
	- Jawa	27344974	78,68	- Jawa	30.019.156	80,69
	- Madura	6.281.058	18,07	- Madura	6.520.403	17,53
	- Lainnya	439.527	1,26	- Cina	244.393	0,66
6.	Provinsi Banten					
	- Banten	3.785.925	46,86	- Banten	4.321.991	40,77
	- Sunda	1.830.973	22,66	- Sunda	2.402.236	22,66
	- Jawa	986.146	12,2	- Jawa	1.657.470	15,63

Sumber: BPS, 2010

Melayu, Bugis, Madura, Banten, dan Banjar. Tidak ada suku yang tinggal di Jakarta dominan dengan persentase di atas 50 persen. Suku Betawi dan Sunda yang lebih mencitrakan suku asli, bahkan persentasenya berturut-turut hanya 27,65 persen dan 15,27 persen. Fakta heterogenitas suku ini juga terjadi di provinsi baru, yakni Provinsi Banten. Suku terbesar di sana, yakni suku Banten, memiliki persentase kurang dari 50 persen dari total penduduk. Sementara itu, terdapat lima suku utama di provinsi tersebut, yakni Banten (46,86 persen), Sunda (22,66 persen), Jawa (12,2 persen), Betawi (9,62 persen), dan Tionghoa (1,11 persen). Bukti komposisi suku yang beragam dari Provinsi DKI Jakarta dan Banten menunjukkan perkembangan suku tidak hanya di dominasi oleh suku Jawa saja.

DKI Jakarta sebagai ibu kota negara merupakan pusat kegiatan pemerintahan, kegiatan perekonomian, serta pusat berbagai

kegiatan lainnya yang menarik banyak penduduk dari berbagai suku untuk datang dan memperbaiki tingkat perekonomiannya. Perluasan pembangunan *the Greater Jakarta* yang selanjutnya melebar ke Provinsi Banten menjadikan Provinsi Banten sebagai kawasan industri yang terus berkembang pesat. Perluasan pembangunan industri ini menyebabkan arus migrasi menuju Provinsi Banten sangat tinggi sehingga heterogenitas penduduk terus berkembang.

Perkembangan Suku di Pulau Kalimantan

Perkembangan suku di Pulau Kalimantan memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan pulau lainnya. Secara umum, suku Banjar adalah suku terbanyak yang terdapat di Pulau Kalimantan kemudian diikuti oleh suku Jawa. Suku Banjar adalah suku terbanyak yang tersebar di Provinsi Kalimantan Tengah

**Tabel 4 Persebaran Suku Dominan (Tiga Terbesar) di Pulau Kalimantan
Tahun 2000 – 2010**

No	Kondisi Tahun 2000			Kondisi Tahun 2010		
	Provinsi/Suku	Jumlah	%	Provinsi/Suku	Jumlah	%
1.	Provinsi Kalimantan Barat					
	- Sambas	444.929	11,92	- Dayak	2.194.009	50,03
	- Tionghoa	352.937	9,46	- Melayu	814.550	18,57
	- Jawa	341.173	9,14	- Jawa	427.333	9,74
2.	Provinsi Kalimantan Tengah					
	- Banjar	435.758	24,2	- Kalimantan Lainnya	588.650	26,67
	- Jawa	325.160	18,06	- Jawa	478.434	21,67
	- Ngaju	324.504	18,02	- Banjar	464.260	21,03
3.	Provinsi Kalimantan Selatan					
	- Banjar	2.271.586	76,34	- Banjar	2.686.627	74,34
	- Jawa	391.030	13,14	- Jawa	524.357	14,51
	- Bugis	73.037	2,45	- Bugis	70.460	1,95
4.	Provinsi Kalimantan Timur					
	- Jawa	721.351	29,55	- Jawa	1.069.826	30,25
	- Lainnya	481.449	19,72	- Bugis	735.624	20,80
	- Bugis	445.820	18,26	- Kalimantan Lainnya	472.179	13,35

Sumber: BPS, 2010

dan Kalimantan Selatan. Kemudian di Provinsi yang sama, suku Jawa menempati peringkat kedua penduduk terbesar selama tahun 2000-2010.

Komposisi suku di setiap provinsi cukup dinamis. Provinsi Kalimantan Barat terdapat suku Sambas, Tionghoa, dan Jawa sebagai tiga besar suku terbesar tahun 2000. Kemudian tahun 2010 susunannya berubah menjadi suku Dayak, Melayu, dan Jawa yang menempati tiga besar suku yang dominan. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tiga suku besar, yaitu Banjar, Jawa, dan Ngaju pada 2000. Urutan tersebut kemudian berubah tahun 2010 menjadi suku Kalimantan lainnya, Jawa, dan Banjar.

Sementara itu, di Kalimantan Selatan terdapat suku yang sama selama 2000-2010, yaitu Banjar, Jawa, dan Bugis. Hal yang menarik adalah di Provinsi Kalimantan Timur. Suku Jawa, bahkan menempati posisi pertama suku terbesar tahun 2000-2010. Perbedaan urutan suku dominan terjadi pada kedua dan ketiga. Pada 2000 posisi setelah suku Jawa adalah suku Kalimantan lainnya kemudian diikuti suku Bugis. Pada 2010 urutannya berubah, suku Bugis menempati posisi kedua terbesar setelah Jawa dan di peringkat ketiga ada suku Kalimantan lainnya. Ini menunjukkan bahwa suku Bugis yang bukan merupakan suku asli Provinsi Kalimantan Timur juga berkembang cukup pesat.

Tabel 5 Persebaran Suku Dominan (Tiga Terbesar) di Pulau Sulawesi Tahun 2000 – 2010

No	Kondisi Tahun 2000			Kondisi Tahun 2010		
	Provinsi/Suku	Jumlah	%	Provinsi/Suku	Jumlah	%
1.	Provinsi Sulawesi Utara					
	- Minahasa	654.720	33,19	- Minahasa	1.019.314	45,03
	- Sangir	390.811	19,81	- Sulawesi Lainnya	879.579	38,86
	- lainnya	252.143	12,78	- Gorontalo	187.163	8,27
2.	Provinsi Sulawesi Tengah					
	- Kaili	412.281	20,5	- Sulawesi lainnya	1.630.937	62,16
	- Bugis	289.492	14,39	- Bugis	409.709	15,62
	- Jawa	166.013	8,25	- Jawa	221.001	8,42
3.	Provinsi Sulawesi Selatan					
	- Bugis	3.266.440	41,9	- Bugis	3.605.693	44,96
	- Makassar	1.982.187	25,43	- Makassar	2.380.208	29,68
	- Toraja	702.951	9,02	- Sulawesi Lainnya	1.578.622	19,68
4.	Provinsi Sulawesi Tenggara					
	- Buton	414.530	23,34	- Bugis	3.605.693	44,96
	- Bugis	341.742	19,24	- Makassar	2.380.208	29,68
	- Tolaki	289.220	16,28	- Sulawesi Lainnya	1.578.622	19,68
5.	Provinsi Gorontalo					
	- Gorontalo	750.541	90,43	- Gorontalo	925.626	89,05
	- Lainnya	34.329	4,14	- Sulawesilainnya	45.113	4,34
	- Jawa	20.427	2,46	- Jawa	35.289	3,40

Sumber: BPS, 2010

Perkembangan Suku di Pulau Sulawesi

Beralih dari tiga pulau sebelumnya, Pulau Sulawesi memiliki keanekaragaman suku tersebar yang relatif berbeda. Jika tiga pulau sebelumnya sangat identik dengan suku Jawa yang menempati suku dengan jumlah penduduk terbanyak, maka di pulau yang terdiri atas lima provinsi ini, suku Jawa hanya muncul di dua provinsi, yaitu Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Pada kedua provinsi tersebut suku Jawa sebagai suku terbesar ketiga selama tahun 2000-2010. Fakta ini adalah bukti bahwa suku Jawa belum berkembang pesat di Pulau Sulawesi. Suku yang paling banyak tersebar di pulau ini adalah suku Bugis. Perkembangan suku Bugis cukup pesat, jumlahnya pada 2010 hampir dua kali dibandingkan dengan jumlah suku Bugis tahun 2000.

Setiap provinsi di Pulau Sulawesi juga memiliki karakteristik suku terbesar yang khas. Di Provinsi Sulawesi Utara, suku Minahasa adalah suku terbesar selama tahun 2000-2010 kemudian diposisi kedua adalah suku Sangir menurut data 2000 dan berubah tahun 2010 menjadi suku Sulawesi lainnya yang menempati posisi kedua. Posisi ketiga adalah suku lainnya menurut data tahun 2000 dan berubah menjadi suku Gorontalo tahun 2010. Provinsi Sulawesi Tengah memiliki suku Jawa pada posisi ketiga suku terbesar dan suku Bugis pada posisi kedua selama 2000-2010. Sementara itu, suku yang menempati peringkat pertama tahun 2000 adalah suku Kaili dan bergeser menjadi suku Sulawesi lainnya tahun 2010. Kemudian di Provinsi Sulawesi Selatan, suku Bugis berada di peringkat pertama dan suku Makassar di peringkat kedua selama tahun 2000-2010. Posisi ketiga tahun 2000 adalah suku Toraja, tetap tahun 2010 suku Sulawesi lainnya yang menempati posisi ketiga suku terbesar

di Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian di Provinsi Sulawesi Tenggara komposisi tiga suku terbesar tahun 2000 sangat berbeda dengan tahun 2010. Pada 2000 tiga suku terbesar dari urutan terbanyak adalah suku Buton, Bugis, dan Tolaki kemudian suku Bugis menjadi terbesar tahun 2010 diikuti dengan suku Makassar dan Sulawesi lainnya. Suku Jawa baru masuk dalam urutan tiga besar suku dominan pada distribusi suku di Provinsi Gorontalo. Suku Jawa menempati urutan ketiga setelah suku Gorontalo dan suku lainnya. Jumlah suku Jawa antara 2000 sampai 2010 di Provinsi Gorontalo meningkat cukup pesat, yakni sekitar 15 ribu penduduk dalam kurun waktu 10 tahun.

Perkembangan Suku di Pulau Bali, NTB, dan NTT

Tiga pulau yang berbeda ini memiliki suku dengan karakteristik tersendiri. Suku-suku yang dominan adalah suku adat asli di setiap provinsi. Suku Jawa yang di Pulau Jawa dan Sumatera dominan, persentasenya kecil di ketiga provinsi ini. Suku-suku asli cenderung dominan dengan persentase cukup tinggi, yakni di atas 60 persen. ini adalah bukti bahwa suku-suku di Provinsi Bali, NTB, dan NTT cenderung lebih homogen.

Provinsi Bali dengan suku Bali menduduki peringkat pertama sebagai suku terbanyak dan suku Jawa di peringkat kedua menurut data tahun 2000-2010. Posisi ketiga tahun 2000 adalah suku lainnya yang kemudian berubah menjadi suku Madura tahun 2010. Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki suku Sasak sebagai suku terbesar tahun 2000-2010. Kemudian Bima dan Sumbawa berturut-turut menempati posisi kedua dan ketiga tahun 2000. Tahun 2010 adalah suku berasal dari NTB lainnya yang menempati posisi dua dan muncul suku Bali yang berada di posisi

Tabel 6 Persebaran Suku Dominan (Tiga Terbesar) di Pulau Bali, NTB, dan NTT Tahun 2000 – 2010

No	Kondisi Tahun 2000			Kondisi Tahun 2010		
	Provinsi / Suku	Jumlah	%	Provinsi/Suku	Jumlah	%
1.	Provinsi Bali					
	- Bali	2.794.793	88,85	- Bali	3.336.065	85,97
	- Jawa	214.598	6,82	- Jawa	372.514	9,60
	- lainnya	38.489	1,22	- Madura	29.864	0,77
2.	Provinsi Nusa Tenggara Barat					
	- Sasak	2.594.629	67,75	- Sasak	3.033.631	67,57
	- Bima	513.055	13,4	- Suku asal NTB lainnya	1.156.493	25,76
	- Sumbawa	319.423	8,34	- Bali	119.407	2,66
3.	Provinsi Nusa Tenggara Timur					
	- Atoni Metto	1.121.433	29,49	- Suku asal NTT	3.793.242	81,18
	- Manggarai	568.445	14,95	- Suku asal Kalimantan	678.090	14,51
	- Sumba	566.428	14,89	- Jawa	54.511	1,17

Sumber: BPS, 2010

ketiga. Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2000 memiliki suku Atoni Metto di peringkat pertama, suku Manggarai di peringkat kedua, dan suku Sumba di peringkat ketiga. Kemudian pada 2010 suku asal NTT adalah suku terbesar dengan persentase lebih dari 81 persen, diikuti suku asal Kalimantan di peringkat kedua dan Jawa di peringkat ketiga.

Perkembangan Suku di Pulau Maluku dan Papua

Pulau Maluku dan Papua masing-masing memiliki dua provinsi. Provinsi di Pulau Maluku adalah Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Provinsi di Pulau Papua adalah Papua dan Papua Barat. Komposisi suku di Kepulauan Maluku pada 2000 memiliki persebaran yang lebih bervariasi dibandingkan dengan tahun 2010. Pada 2000 suku-sukunya tidak ada yang dominan, persentasenya sekitar 10 persen, yakni di Provinsi Maluku adalah suku Kei (10,97 persen), Buton (10,59 persen), dan Ambon (10,56 persen). Begitu pula di Provinsi

Maluku Utara, yaitu suku Sula (9,46 persen), Makian (9,12 persen), dan Galela (7,24 persen). Fakta ini menjadi bukti bahwa suku-suku di Pulau Maluku sangat beragam dan heterogen. Itulah sebabnya pada 2010 suku-suku yang beragam tersebut digabungkan ke dalam suku besar dari tiap pulau. Pada 2010 urutan suku dominan di Pulau Maluku adalah suku Maluku di peringkat pertama, suku Sulawesi di peringkat kedua, dan suku Jawa di peringkat ketiga.

Berbeda dengan provinsi di Pulau Maluku, Provinsi di Pulau Papua, yakni Papua dan Papua Barat, memiliki persebaran suku Jawa yang lebih dominan. Provinsi Papua pada 2000 memiliki distribusi suku, yaitu Jawa, Biak Numfor, dan Dani. Tahun 2010 berbagai suku kecil di Papua digabung menjadi satu menjadi suku Papua, selanjutnya mendominasi menjadi 76,31 persen, selanjutnya di urutan kedua adalah suku Jawa (8,39 persen), dan urutan ketiga suku asal Sulawesi (3,67 persen). Perkembangan suku Jawa terlihat lebih cepat di Provinsi Papua Barat. Pada 2000 suku Jawa

**Tabel 7 Persebaran Suku Dominan (Tiga Terbesar) di Pulau Maluku dan Papua
Tahun 2000 – 2010**

No	Kondisi Tahun 2000			Kondisi Tahun 2010		
	Provinsi / Suku	Jumlah	%	Provinsi/Suku	Jumlah	%
1.	Provinsi Maluku					
	- Kei	125.954	10,97	- Maluku	1.127.148	73,83
	- Buton	121.579	10,59	- Sulawesi	247.266	16,20
	- Ambon	120.969	10,53	- Jawa	79.340	5,20
2.	Provinsi Maluku Utara					
	- Sula	63.282	9,46	- Maluku	687.003	66,35
	- Makian	60.985	9,12	- Sulawesi Lainnya	240.427	23,22
	- Galela	52.639	7,24	- Jawa	42.724	4,13
3.	Provinsi Papua					
	- Jawa	211.663	12,48	- Papua	2.121.436	76,31
	- Biak Numfor	126.070	7,43	- Jawa	233.145	8,39
	- Dani	120.745	7,12	- Sulawesi Lainnya	102.157	3,67
4.	Provinsi Papua Barat					
	- Jawa	211.663	12,48	- Papua	387.816	51,48
	- Biak Numfor	126.070	7,43	- Jawa	111.274	14,77
	- Dani	120.745	7,12	- Maluku	78.855	10,47

Sumber: BPS, 2010

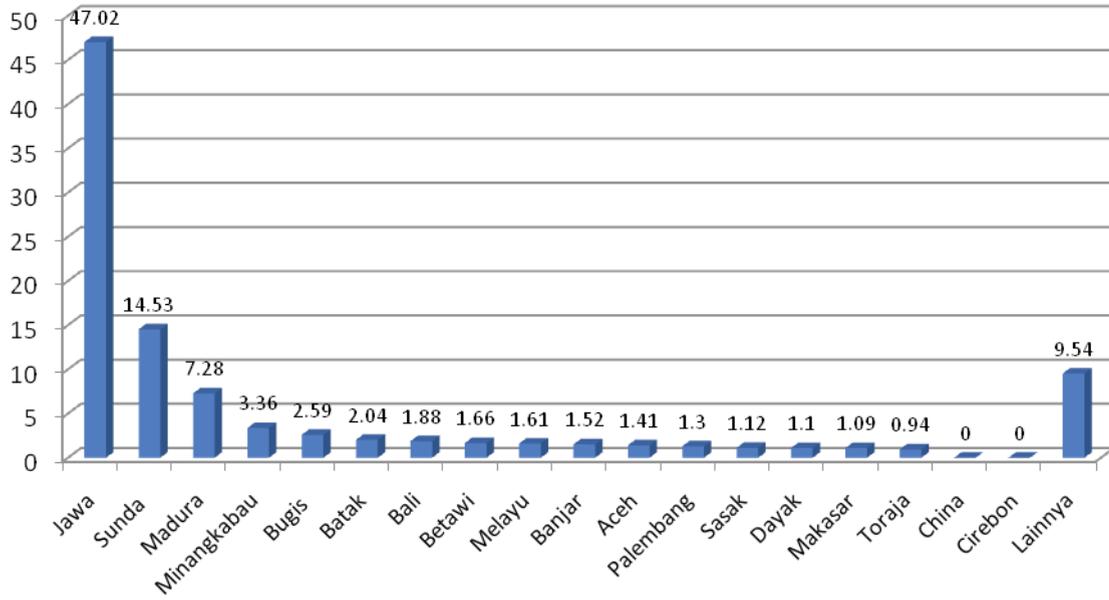
adalah peringkat pertama dengan persentase 12,48 persen. Jumlah tersebut meningkat pada 2010 menjadi 14,77 persen walaupun peringkatnya turun menjadi urutan kedua. Hal ini terjadi karena suku-suku asli di Provinsi Papua Barat digabung menjadi suku Papua.

Perkembangan Komposisi Suku di Indonesia 1930-2010

Studi etnisitas di Indonesia sejak era kemerdekaan, Orde Lama, dan Orde Baru menjadi sebuah hal yang dihindari karena berpotensi melemahkan integrasi bangsa. Diskusi tentang etnik secara berkepanjangan berujung pada persoalan SARA yang tentunya harus disikapi secara hati-hati. Hal ini terbukti dengan sedikitnya kajian tentang etnik. Studi kependudukan yang mendalam tentang etnik dilaksanakan pertama kali pada

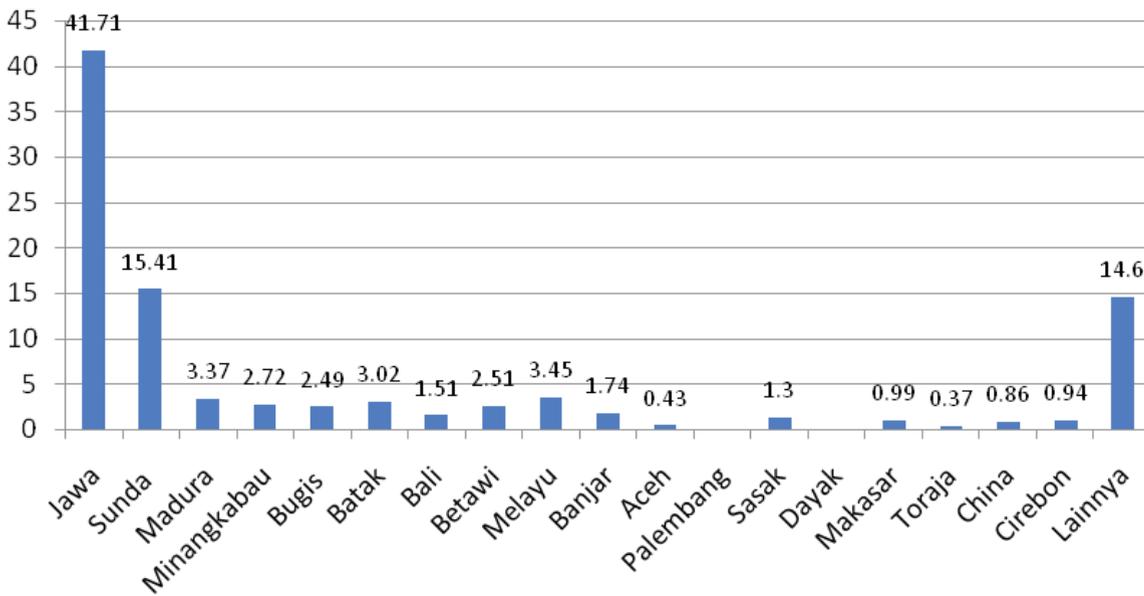
1930 di zaman Pemerintah Belanda. Setelah itu, kajian etnik baru ada pada era reformasi, yakni tahun 2000 berdasarkan hasil Sensus BPS. Begitu pula berdasarkan pada hasil Sensus Penduduk 2010, studi tentang etnik dilihat kembali.

Distribusi penduduk Indonesia menurut etnik pada 1930 didominasi oleh etnik Jawa, yaitu sekitar 47,02 persen. Hampir separuh dari penduduk Indonesia adalah Jawa, kemudian disusul Sunda (14,53 persen), Madura (7,28 persen), Minangkabau (3,36 persen), Bugis (2,59 persen), dan etnik-etnik lainnya (lihat Gambar 1). Hal ini menjadi bukti bahwa sejak sebelum Indonesia merdeka, etnik yang ada di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Sunda, dan Madura adalah tiga etnik besar yang mendominasi di Indonesia. Etnik dari pulau lain yang cukup dominan adalah etnik Minangkabau, Bugis, Batak, dan Bali.



Sumber: BPS, 2010

Gambar 1 Komposisi Suku di Indonesia Tahun 1930 (dalam Persen)



Sumber: BPS, 2010

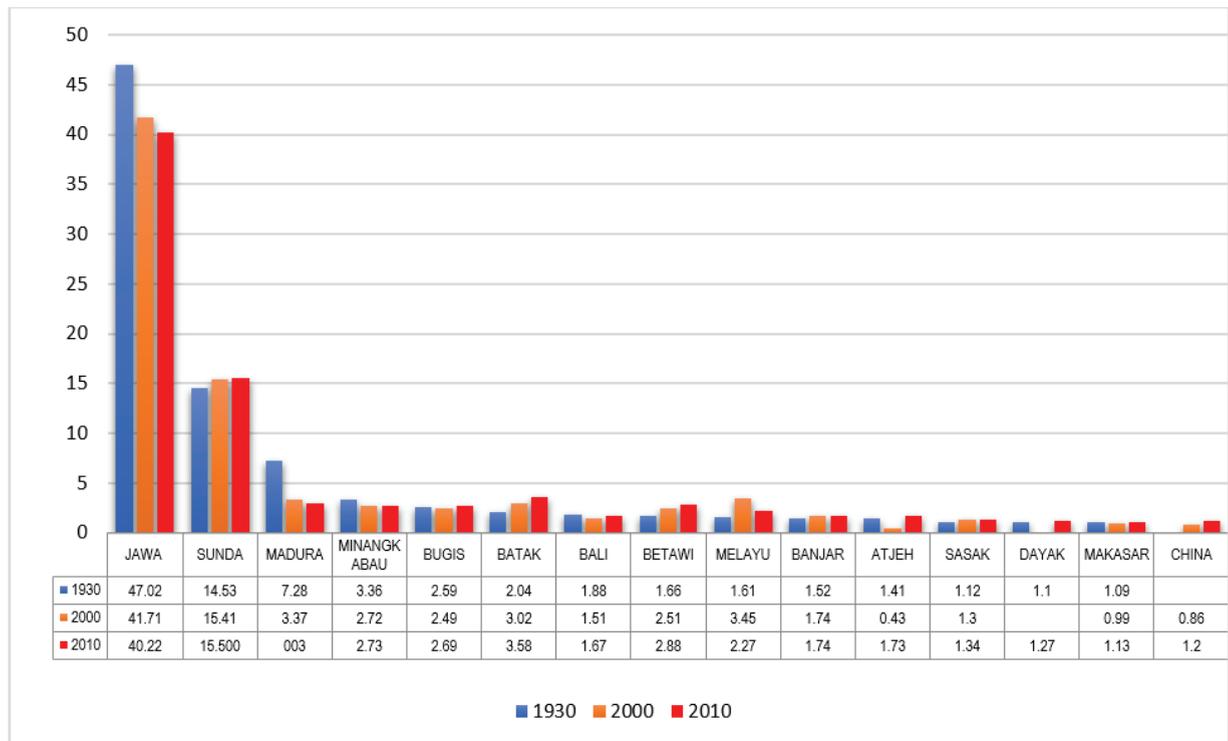
Gambar 2 Komposisi Suku di Indonesia Tahun 2000 (dalam Persen)

*DINAMIKA PERKEMBANGAN ETNIS DI INDONESIA DALAM KONTEKS
PERSATUAN NEGARA*

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2000, terjadi perubahan urutan lima suku terbesar di Indonesia. Suku Jawa, Sunda, dan Madura tetap menjadi tiga tertinggi, suku Batak yang di tahun 1930 berada di urutan keenam (2,04 persen), pada 2000 menjadi urutan keempat (3,02 persen). Urutan suku Bugis turun dari lima besar di 1930 menjadi urutan keenam di 2000 (lihat Gambar 2). Hal lain yang menarik adalah keberadaan suku dari luar negeri, yakni suku China/Tionghoa, yang pada 1930 persentasenya sangat kecil kemudian pada 2000 telah mendekati satu persen.

Pada periode 1930-2000, etnis Jawa dari 47,02 persen turun menjadi 41,71 persen dari total penduduk di Indonesia walaupun populasi etnis Jawa di Indonesia cenderung mendominasi di berbagai pulau. Kondisi itu tidak lepas dari program pemerintah yang dilakukan sejak pemerintahan kolonial Belanda yang dilanjutkan oleh

Pemerintah RI sebagai upaya pemerataan pembangunan dan penyebaran penduduk dari pulau padat penduduk menuju pulau dengan penduduk yang jarang. Namun, berdasarkan persentase penduduk, etnis Jawa menurun 6 persen. Program kependudukan yang optimal dilaksanakan di Indonesia pada era Orde Baru, yakni Keluarga Berencana (KB), dapat menjadi penjelas penurunan persentase suku Jawa. Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan kependudukan dua anak cukup cenderung diterima secara kuat di Pulau Jawa. Selain suksesnya program keluarga berencana, pendidikan untuk perempuan dan kesempatan kerja bagi perempuan mampu menekan angka pernikahan dini di kalangan perempuan. Pendidikan juga mampu memberikan kontribusi tidak langsung terhadap kesadaran masyarakat untuk merencanakan kelahiran anak.



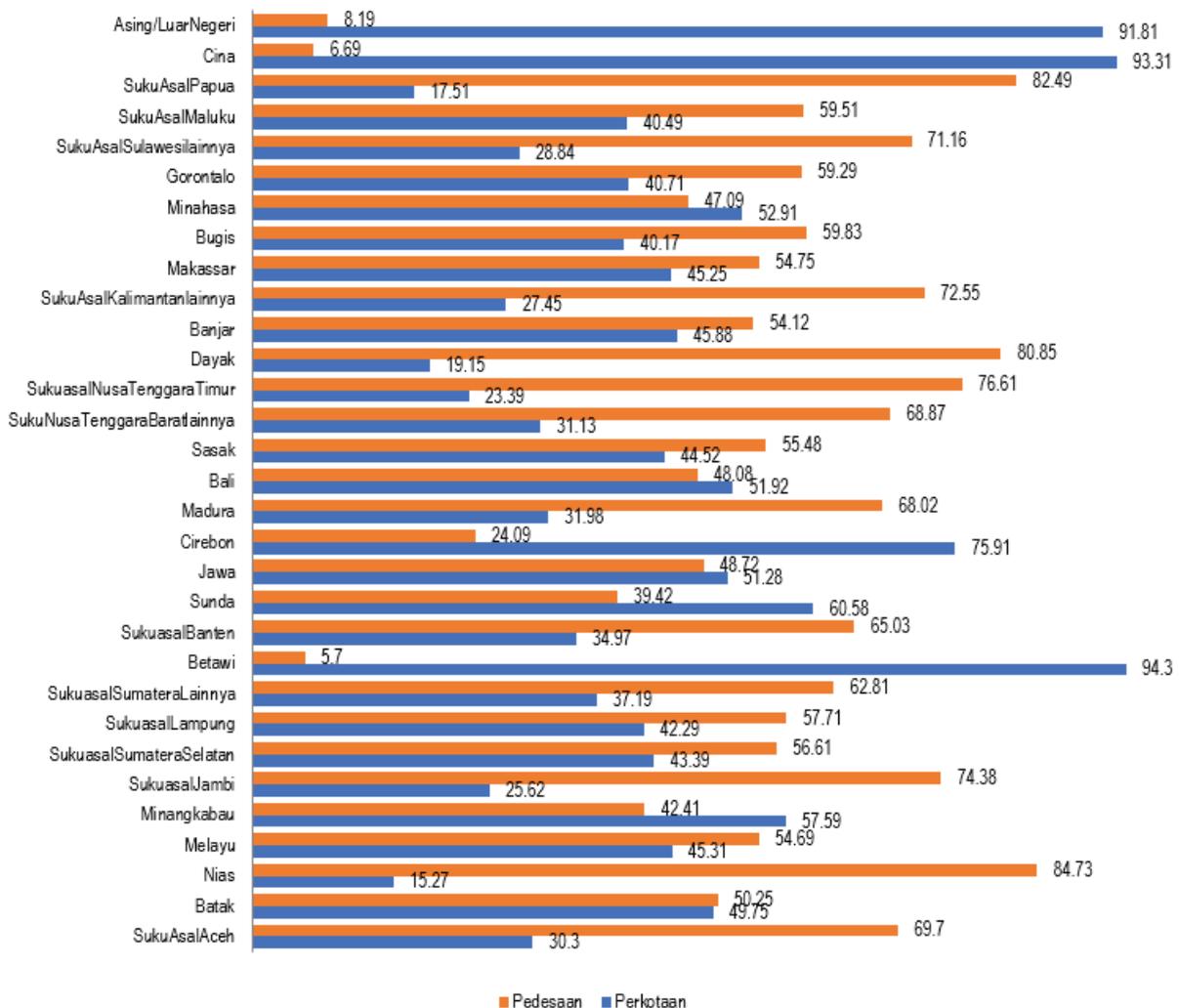
Sumber: BPS, 2010

Gambar 3 Dinamika Suku di Indonesia Tahun 1930 – 2010 (dalam Persen)

Tidak kalah menarik dengan penurunan suku Jawa, suku Madura menurun drastis dari 7,28 persen, menjadi 3,37 persen. Suku Madura adalah salah satu suku yang aktif berperan dalam suksesnya program pemerintah yakni transmigrasi. Berbagai kerusuhan berbasis etnik sebagaimana terjadi di Pulau Kalimantan, setidaknya menjadi penjelas penurunan persentase suku Madura di Indonesia. Kerusuhan yang berskala nasional tersebut, dengan ribuan korban jiwa tentu saja mengurangi

jumlah penduduk etnis Madura di Indonesia tahun 2000. Kejadian traumatis tersebut juga diperkirakan berpengaruh terhadap pengakuan suku saat dilakukan sensus. Artinya, banyak suku Madura yang menjawab bukan suku Madura saat dilakukan sensus demi menjaga keamanan diri mereka. Hal lain yang berhubungan dengan penurunan suku Madura adalah keberhasilan program KB.

Perbandingan data dari tahun 1930 dengan sensus penduduk tahun 2000 dan sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan



Sumber: BPS, 2010

Gambar 4 Komposisi Suku di Indonesia menurut Status Desa dan Kota Tahun 2010 (dalam persen)

tren penurunan untuk etnik Jawa dari 47,02 persen di tahun 2000 dan kembali turun menjadi 41,71 persen di tahun 2010. Kenaikan persentase terjadi pada etnik Sunda dari tahun 1930 sebanyak 14,53 persen menjadi 15,41 persen kemudian kembali naik menjadi 15,50 di tahun 2010. Tidak kalah menarik juga pertumbuhan etnik Tionghoa yang juga mengalami kenaikan dari 0,86 persen menuju 1,2 persen. Kelengkapan data etnik ini dapat dilihat lebih detail di Sensus Penduduk tahun 2010 oleh BPS sehingga dapat dilihat persebaran etnik di desa dan kota di Indonesia.

Persebaran etnik di kota-kota didominasi oleh penduduk etnik Tionghoa, Betawi, dan Cirebon, Sunda serta penduduk asing. Selain suku tersebut, komposisi desa dan kota cenderung seimbang. Etnik Betawi sebagai penduduk asli Jakarta cenderung lebih banyak tinggal diperkotaan, begitu juga dengan etnik Tionghoa yang sebagian besar berada pada pusat-pusat perekonomian. Sebagian etnik Tionghoa yang tinggal di desa adalah mereka yang berada di Kalimantan karena populasi etnik Tionghoa cenderung lebih banyak.

Dari persebaran ini terlihat kesenjangan antara penduduk desa dan kota yang sangat tajam. Beberapa suku, seperti etnik Papua, Nias, sebagian etnik Lampung, dan etnik Nusa Tenggara berada pada perdesaan. Dapat dikatakan bahwa mereka jauh dari pusat-pusat kegiatan perkotaan dan pusat perekonomian. Sementara itu, di Indonesia jumlah kemiskinan tertinggi berada di perdesaan.

Dinamika Suku dalam Konteks Negara Persatuan

Membangun masyarakat multikulturalis Indonesia berarti menempatkan kesetaraan dalam perbedaan sebagai posisi sentral

dalam ideologi yang dibangun (Syaifuddin, 2006). Tentu saja hal tersebut berbeda dengan konsep pluralisme yang menjadikan perbedaan, dalam hal ini keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaan, sebagai posisi sentral. Jika pluralisme menganggap bahwa perbedaan kebudayaan masyarakat harus dihargai dan dijamin hak-haknya oleh penguasa, multikulturalisme menekankan pada gagasan kesetaraan dan saling menghargai dengan mempertimbangkan keberadaan budaya lainnya. Secara lebih lanjut, multikulturalisme di Indonesia dapat diarahkan untuk menguatkan kesadaran atas identitas bersama yaitu nasionalisme. Kemudian kemajemukan budaya dianggap sebagai ciri yang melekat pada bangsa Indonesia dan masyarakat multi etnis sebagai penggerak untuk mencapai tujuan bersama karena menyadari bahwa ideologi yang dibentuk secara historis memiliki tujuan yang sama, yaitu persatuan Indonesia. Dengan demikian, konsep multikulturalisme dapat digunakan sebagai langkah menjaga persatuan negara.

Di sisi lain, perkembangan suku di Indonesia yang semakin heterogen dalam suatu wilayah administrasi dapat menyebabkan pemerintah sebagai pengatur wilayah belum maksimal mewujudkan kesetaraan multikultural. Terwujudnya masyarakat multikulturalis seharusnya didukung dengan adanya kebijakan multikultural (Syaifuddin, 2006) yang mengedepankan kesetaraan dan saling menghargai dalam pengelolaan perbedaan kebudayaan. Secara teoretis, unsur dominan seringkali dianggap sama dengan unsur mayoritas dalam suatu kelompok walaupun hal ini tidak selalu benar (Syaifuddin, 2006). Seringkali pengutamaan kelompok mayoritas dalam implementasi kebijakan tersebut melupakan adanya kelompok lain,

dalam hal ini etnis minoritas. Hal tersebut yang kemudian dapat memicu konflik etnik.

Tidak hanya dalam permasalahan perekonomian, akulturasi budaya juga diperlukan untuk meredam gesekan antarsuku di provinsi yang cenderung heterogen. Provinsi Jawa Barat perlu mendapatkan perhatian khusus dalam hal nasionalisme, baik bagi etnik pendatang maupun etnik asli Jawa Barat. Hal tersebut mengingat bahwa selain sebagai perluasan pembangunan Kota Jakarta, Bandung juga merupakan tujuan pendidikan bagi penduduk di Indonesia.

Kesimpulan

Perkembangan etnik di Indonesia secara historis menunjukkan bahwa suku di Indonesia tersebar secara heterogen dengan keanekaragaman yang tinggi. Salah satu jalan untuk mewujudkan persatuan bangsa di tengah masyarakat yang heterogen adalah melalui masyarakat multikulturalis. Melalui masyarakat multikulturalis yang saling menghargai perbedaan kebudayaan, akan dapat tercipta masyarakat yang memiliki pandangan, jiwa, dan tujuan yang sama. Selain itu, perwujudan dari perkembangan etnik di Indonesia juga harus disertai dengan adanya dukungan kebijakan pemerintah yang tidak hanya memihak pada golongan mayoritas saja karena asas yang dikedepankan adalah persamaan dan menghargai hak atas perbedaan kebudayaan.

Daftar Pustaka

Abdullah, Irwan. 2006. "Tantangan Multikulturalisme dalam Pembangunan". *Jurnal Antropologi Sosial Budaya. Etnovisi*, II (1).

Arkanudin. 2006. "Menelusuri Akar Konflik Antaretnik". *Mediator*, VII (2).

Asry, M. Yusuf. 2013. *Masyarakat Membangun Harmoni, Resolusi Konflik dan Bina Damai Etno Relijius di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 2010. *Peta Kawasan Rawan Konflik di DKI Jakarta*. Jakarta: BKBP

BPS. 2011. *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia: Hasil Analisis Sensus Penduduk 2010*. Jakarta: BPS

BPS. 2015. *Bunga Rampai Analisis Determinan Hasil SP 2010*. Jakarta: BPS.

Darwin, Muhadjir. 2003. *Freedom From Fear: Social Disruption and System Violence in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asia Studies.

Harahap, Ahmad Rivai. 2006. "Multikulturalisme dalam Bidang Sosial". *Jurnal Antropologi Sosial Budaya. Etnovisi*, II(1).

Hendrastomo, Grendi. 2012. "Potensi Konflik Dibalik Munculnya Komunitas Berpagar". *Socia*, 11(1), 31 – 41.

Kambo, Gustiana, A. 2015. "Etnisitas dalam Otonomi Daerah". *The POLITICS*. *Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(1).

Lubis, Nur A. Fadhil. 2006. "Multikulturalisme dalam Politik: Sebuah Pengantar Diskusi Multikulturalisme dalam Politik". *Jurnal Antropologi Sosial Budaya Etnovisi*, VII(1).

Syaifuddin, Achmad Fedyani. 2006. "Membumikan Multikulturalisme di Indonesia". *Jurnal Antropologi Sosial Budaya. Etnovisi*, II(1).

Suryadinata, Leo., Evi Nurvidya Arifin, Aris Ananta. 2003. *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Tan, Sofyan. 2006. "Pendidikan Multikulturalisme: Solusi Ancaman

*DINAMIKA PERKEMBANGAN ETNIS DI INDONESIA DALAM KONTEKS
PERSATUAN NEGARA*

Disintegrasi Bangsa”. Jurnal Antropologi
Sosial Budaya. *Etnovisi*, II(1).

Tarigan, Robert Valentino. 2006. “Pendidikan
Multikulturalisme: Dari Lingkup Keluarga
Hingga Media Massa Multikulturalisme”.
Jurnal Antropologi Sosial Budaya. *Etnovisi*,
II(1).

Tirtosudarmo, Riwanto. 2007. *Mencari
Indonesia: Demografi – Politik Pasca
Soeharto*. Jakarta: LIPI Press.